

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah dari beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dan dengan penelitian yang peneliti lakukan. *Pertama* Penelitian serupa dengan judul “Efektivitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Dana Desa” dilakukan oleh Gayatri dan Made Yenni Latrini (2018) penelitian ini..bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban dana desa yang diberikan pemerintah dan setiap tahun mengalami peningkatan. Aplikasi SISKEUDES digunakan untuk mempermudah penatausahaan laporan keuangan dana desa. Penerapan aplikasi SISKEUDES akan mempercepat penyelesaian laporan keuangan dana desa dengan akurat dan tepat waktu. Populasi dalam penelitian ini yaitu 46 desa di Kabupaten Badung yang menerima dana desa. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini sebanyak 30 desa. 18 desa berpartisipasi untuk menjawab kuesioner yang diberikan dengan responden sebanyak 73 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana.

Pada penelitian tersebut diperoleh hasil semua pernyataan yang berhubungan dengan efektivitas penerapan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan dana desa dinyatakan valid dan reliabel. Hasil pengujian

Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal, dalam deskriptif statistik diperoleh nilai minimum SISKEUDES adalah 3 (positif) dan nilai maksimum 4 (sangat positif) dengan nilai rata-rata adalah 3.09 dan standar deviasi 0,268, sedangkan nilai minimum kualitas laporan keuangan adalah 3 (positif) dan nilai maksimum 4 (sangat positif) serta nilai rata-rata 3,17 dengan standar deviasi 0,296. Dari tabel model summary hasil analisa menemukan nilai R^2 sebesar 0,270 artinya besarnya prosentase pengaruh variabel SISKEUDES (independen) terhadap kualitas laporan keuangan (variabel dependen) sebesar 27% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain lalu dari uji ANOVA diperoleh hasil penerapan sistem informasi keuangan dana desa (SISKEUDES) efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Kabupaten Badung yang dilakukan penelitian telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan pengaruh yang positif dari penerapan aplikasi SISKEUDES sehingga dari penelitian ini diharapkan desa-desa lainnya juga menerapkan sistem yang sama sehingga tujuan dari pemerintah dapat tercapai.

Penelitian *kedua* yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ririn Fitriani (2018) dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu apakah sudah berjalan dengan baik sudah efektif dan efisien serta hambatan apa saja yang mungkin terjadi selama menerapkan Aplikasi

SISKEUDES. Penelitian tersebut menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pada penelitian tersebut diperoleh hasil dilihat dari model Charles O Jones Penelitian menunjukkan tiga indikator implementasi kebijakan SISKEUDES dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya Desa Bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi SISKEUDES, hambatan dari penggunaan aplikasi ini adalah jaringan internet yang kurang memadai dan belum mendapat akses internet dan masih membutuhkan fasilitator pendamping untuk pelaksanaan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Ketiga, penelitian serupa yang peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sapril Sardi Juardi (2017) dengan judul “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)” penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa apakah dengan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan menjadi lebih berkualitas dan dapat dikatakan efisien.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penginputan dan pelaporan keuangan sudah menerapkan prinsip patuh, taat dan relevan. Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetallasa sangat membawa

perubahan yang baik terhadap proses pelaporan pertanggungjawaban dan kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik dari sebelum menerapkan aplikasi SISKEUDES aplikasi tersebut membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan lebih cepat dan tepat waktu.

Keempat, penelitian yang juga berhasil peneliti temukan berkaitan dengan SISKEUDES adalah penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Trisha Sulina (2017) dengan judul “Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan)” penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintah desa apakah membawa pengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia yang menerapkan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan adanya aplikasi dalam pengelolaan keuangan, pengaruh apa yang ditimbulkan terhadap penggunaannya.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil (1) Penginputan data pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem, (2) Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan, (3) Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan dampak positif terhadap terhadap kinerja pegawai. Itu berarti sistem SISKEUDES

memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai dilingkup desa.

Setelah peneliti mengamati dan mempelajari dari tujuan dan hasil penelitian terdahulu judul yang peneliti ambil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Made Yenni Latrini (2018) kesamaan terletak pada penelitian yang berfokus pada efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES namun juga terdapat banyak perbedaan diantaranya penelitian menjelaskan efektivitas dalam segi penggunaan aplikasi SISKEUDES yang menghasilkan kualitas laporan keuangan di desa yang lainnya dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian pada desa yang baru menerapkan aplikasi SISKEUDES dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Peneliti juga lebih berfokus dalam mengungkapkan kualitas laporan keuangan sebagai hasil akhir setelah diterapkannya aplikasi SISKEUDES dan metode yang digunakan sebelumnya adalah penelitian dengan melibatkan responden pada lingkup pemerintah desa sehingga metode penelitian yang dilakukan Gayatri dan Made Yenni Latrini (2018) adalah metode kuantitatif dengan menggunakan angka – angka sebagai acuan penelitian. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang lebih mengungkapkan efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES sehingga dapat menunjang kualitas laporan keuangan desa melalui teknik wawancara oleh pihak – pihak terkait.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Efektivitas

Menurut (Bungkaes,2013) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan secara umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari bahasa inggris *effective* yang artinya berhasil atau segala sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik hal ini juga dapat diartikan : (1) ada efeknya, pengaruhnya, akibatnya, kesannya; (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktiviitas sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan target / tujuan.

Menurut (Gibson et.al. dalam Bungkaes,2013) efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, atau organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka semakin efektif dalam menilai mereka dilihat pengertian dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu individu, kelompok dan organisasi dari ketiga tingkatan tersebut sejalan dengan tanggungjawab atas efektivitas individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Ravianto dalam (Masruri, 2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,

sejauh mana orang menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai definisi efektivitas maka dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas adalah ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya, artinya suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila *output* sesuai dengan karakteristik dan standar yang ditetapkan dapat selesai tepat pada waktunya.

2.2.2 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni, *deca* yang artinya tanah atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga memiliki tujuan yang sama diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa. sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan satuan terkecil dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan hak serta wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan hak asal usul, hak tradisional, dan prakarsa yang di jalankan dengan berpegang teguh pada aturan serta norma-norma yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli :

1. Menurut (R. Bintarto, 2011:4), desa merupakan perwujudan dari kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat pada suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah yang lainnya.
2. Menurut (Paul H. Landis, 2014:15), desa adalah daerah yang mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.
3. Menurut (Sutardjo Kartohadikusumo, 2015:9), desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dari pendapat para ahli tersebut di atas penulis menyimpulkan pada intinya desa merupakan tempat tinggal oleh sekumpulan masyarakat yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu negara yang diatur berdasarkan aturan dan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya masing – masing sesuai dengan kemampuannya masing – masing.

2.2.3 Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 1 Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dan bernilai berupa uang atau barang. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didanai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam Permendagri 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 periode akuntansi atau setara dengan 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan desa merupakan *asset* yang harus dikelola dengan baik oleh seorang Kepala Desa yang melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan sehingga tujuan dari program pemerintah untuk lebih memfokuskan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran dana desa yang dikhususkan untuk operasional desa dapat tercapai.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dalam menghasilkan tujuan tertentu. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda karena, para ahli meninjau dari sudut pandang yang berbeda-beda namun pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama.

Berikut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi pengelolaan yakni menurut (Adi Sasmita, 2011:21) pengelolaan hampir serupa dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk

memanfaatkannya secara efektif material dan fasilitas yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengelolaan desa adalah bentuk dari tahapan atau proses. Dalam mengelola keuangan desa ada 4 tahap untuk dapat mencapai tujuan diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. (1) Perencanaan adalah tahap dimana program / kegiatan akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya,(2) Pelaksanaan keuangan desa adalah kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada sebelumnya kemudian pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa untuk mencapai target pelaksanaan harus terlaksana dengan baik, (3) Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah tahapan pelaksanaan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini juga seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dan kemudian disusun untuk dilaporkan, dan (4) Pelaporan keuangan desa adalah tahap yang terakhir dilakukan setelah tahap penatausahaan. Setelah semua proses selesai disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang berwenang dalam laporan keuangan tersebut.

Pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas akan mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat desa dengan pengawasan dan peran serta masyarakat

desa bersama perangkat dan kepala desa sehingga meminimalisasi adanya *fraud*/kecurangan yang dapat menjadi *boomerang* di kemudian hari. Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 3 seorang Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Namun dalam tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa, seorang Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD yang didalam nya berasal dari 3 (tiga) unsur perangkat desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.

2.2.5 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi adalah rancangan sistem untuk mengolah data menggunakan aturan dan ketentuan Bahasa progam. Aplikasi dibuat untuk memudahkan pengerjaan dan pelaksanaan tugas khusus yang dilakukan oleh pengguna. Aplikasi merupakan alat yang digunakan untuk pengolah suatu data. Menurut (Sanjaya, 2015) dalam Dhanta aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lainnya. Menurut

(Jogiyanto,2013) aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.

Jadi aplikasi merupakan sebuah transformasi dari sebuah permasalahan atau pekerjaan berupa hal yang sulit difahami menjadi lebih sederhana, mudah, dan dapat dimengerti oleh pengguna. Sehingga dengan adanya aplikasi, sebuah permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat. Aplikasi memiliki banyak jenis, diantaranya aplikasi desktop yang beroperasi secara offline maupun aplikasi web yang beroperasi secara online. Aplikasi web yang beroperasi secara online menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer yang terhubung dengan internet (Ramzi, 2013).

Menurut survey BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangatlah minim dan sebagian besar bukan lulusan dari jurusan komputer dan administrasi yang menunjang kinerja dalam hal keuangan khususnya keuangan desa, padahal dana yang harus dikelola oleh desa sangatlah banyak. SISKEUDES adalah aplikasi non bayar yang dapat menjadi solusi bagi penggunanya.SISKEUDES didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan& diklatSISKEUDES bagi perangkat desa

maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Selain non bayar, SISKEUDES juga memiliki banyak keunggulan / kelebihan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar aplikasi SISKEUDES dapat diimplemetasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Saat ini, 69.875 dari total 74.957desa telah mengimplementasikan SISKEUDES.Selanjutnya menurut petunjuk teknis (Juknis) penggunaan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0 tahun 2018 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kemendagri yang dirilis dan diterapkan mulai tahun 2015 didukung oleh surat keputusan menteri dalam negeri Nomor : 143/8350/BPD tertanggal 27 November 2015 perihal aplikasi pengelolaan keuangan desa dan diperkuat oleh surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 perihal himbauan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES tersebut mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES dirilis dan dikembangkan setiap kali ada perubahan dan revisi terakhir rilis V1.0.R1.06 versi tersebut hanya berlaku pada akhir tahun anggaran 2018 dan baru diterapkan sekitar tahun 2017 namun baru berjalan secara merata pada tahun 2018.

Pada sekitar tahun 2018 Kemendagri merilis versi baru Aplikasi SISKEUDES rilis versi 2.0 aplikasi tersebut disesuaikan dengan regulasi pencabutan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang menggunakan *database* Microsoft Acces dengan maksud dan tujuan aplikasi SISKEUDES dapat digunakan oleh orang awam sekalipun lebih *portable* dan mudah digunakan. Database yang digunakan adalah database SQL Server yang digunakan untuk tujuan tertentu dan telah masuk dalam kategori skala menengah.

Aplikasi SISKEUDES dimaksudkan BPKP dan Kemendagri untuk memberi kemudahan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban yang sebelumnya diterapkan dan diuji coba aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Keunggulan dan kelebihan Aplikasi SISKEUDES :

Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES versi Permendagri 20 Tahun 2018 diantaranya :

1. Sesuai dengan regulasi.Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku
2. Aplikasi SISKEUDES memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa.
3. User friendly..sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level Pemerintah Desa.

4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa (built-in internal control).
6. Kesenambungan Maintenance karena merupakan aplikasi resmi Pemerintah.
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau langsung menunjuk Kaur Keuangan namun pemegang peranan penting pengelolaan aplikasi ini adalah operator SISKEUDES yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa yang telah mengikuti pelatihan SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES ini dibedakan menjadi tiga tingkatan operator / level otoritas yang dapat login user pada tampilan menu SISKEUDES login user dimaksudkan agar...keamanan dan melindungi data dalam aplikasi SISKEUDES sehingga lebih terjaga, *pertama* Level Operator yang khusus digunakan untuk pemerintah desa, *kedua* Level Supervisor yang khusus digunakan untuk pemerintah kecamatan, dan *ketiga* adalah Level admin yang khusus digunakan untuk pemerintah daerah/DPMD.

Login user yang digunakan diisi dengan User ID :*user* dengan password login : *user*. Selanjutnya login ini akan dilakukan oleh Admin SISKEUDES pemda. Sehingga setiap desa akan mendapatkan User dan Password yang berbeda – beda tahun anggaran yang diinputkan sesuai dengan SML yang diberikan. Untuk memberikan keamanan kepada operator yang menangani aplikasi SISKEUDES ini diberikan kewenangan untuk dapat mengubah password baru sehingga lebih memudahkan dalam proses login melalui menu ganti ID user dan password.

2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas dapat diartikan kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010:96). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan adalah merupakan laporan yang terstruktur terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan suatu informasi berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan laporan perubahan ekuitas yang memberikan manfaat bagi penggunanya dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait dengan alokasi sumber daya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimaksud adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga menghasilkan suatu informasi keuangan yang berkualitas, diantaranya laporan keuangan harus :

1. Relevan

Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna/pemangku kepentingan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa dimasa lalu, masa kini, atau dapat pula memprediksi masa depan, serta dapat mengevaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.

Informasi yang relevan :

- a. Memiliki umpan balik (*feedback value*) maksudnya, informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi penggunaanya di masa lalu
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*) maksudnya, informasi dapat membantu penggunaanya untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan perkiraan dan hasil masa lalu dan kejadian dimasa kini
- c. Tepat waktu maksudnya, informasi disajikan tepat waktu agar dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap maksudnya, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi yang dibutuhkan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Semua informasi keuangan yang diungkapkan jelas tidak ada kekeliruan dan hal tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut, diantaranya :

- a. Penyajian jujur disini informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar
- b. Dapat diverifikasi (verifiability) disini yang dimaksud adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya pun akan tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
- c. Netralitas disini maksudnya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disajikan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun artinya konsisten dan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada daripada kebijakan akuntansi yang sekarrang diterapkan, perubahan itu diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas laporan keuangan merupakan *outcome* dari pengelolaan keuangan yang disusun dan dibuat mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SPAP) laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan dilaporkan tepat waktu namun ada beberapa tujuan dari laporan keuangan itu sendiri diantaranya mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, melaporkan hasil operasi, melaporkan kondisi keuangan dan melaporkan sumber daya jangka panjang. Secara umum

laporan keuangan ditujukan untuk pemangku kepentingan dan semua pengguna keuangan yang memerlukan informasi dari laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai pengurusan dan ketataan, kondisi keuangan, kinerja pemerintah desa, dan dampak ekonomi maksudnya perkembangan ekonomi sejauh ini bagaimana. Kualitas laporan keuangan yang berkualitas juga menunjukkan kualitas seorang Kepala Desa bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam mengelola organisasi.

2.3 Kerangka Konseptual

Besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan desamaka dibuatlah sebuah aplikasi pengolahan keuangan yang dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan keuangan desa yang berkualitas. Untuk mengukur tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 harus memenuhi 4 (empat) karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Melalui pemerintah desa dalam hal ini adalah aparatur desa pihak yang terkait dengan proses pelaporan keuangan desa secara langsung / operator SISKEUDES yang diberikan wewenang secara langsung untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES kemudian operator SISKEUDES dapat langsung membuat laporan keuangan dengan mengentry data dari bendahara maupun dari kaur keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) melihat 4 (empat) karakteristik laporan

keuangan desa dikatakan berkualitas secara pelaporan, penyajian dan pertanggungjawaban.

Jika laporan keuangan telah memenuhi keempat karakteristik tersebut maka penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) efektif untuk diterapkan di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

